



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
**UNIT KERJA** : UNIT INDUK DISTRIBUSI (UID) RIAU DAN KEPULAUAN RIAU

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **AGUNG MURDIFI**
2. Jabatan : **GENERAL MANAGER**
3. NHK : **259883**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 4.325.000.000**

1. Tanah Seluas 3350 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI  
Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 2190 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL  
SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI  
Rp. 375.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 305 m2/209 m2 di KAB / KOTA  
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.440.000.000
5. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI  
Rp. 180.000.000
6. Bangunan Seluas 34 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL  
SENDIRI Rp. 330.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 850.500.000**

1. MOBIL, HONDA BRIO MINI BUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.  
65.000.000
2. MOBIL, HYUNDAI IONIC 5 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.  
785.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA****Rp. 545.000.000****D. SURAT BERTHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 2.359.705.262****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 8.080.205.262**



III. HUTANG

Rp. 256.104.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.824.101.262

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.